



---

# INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (IKPLHD)

---

**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**EKSEKUTIF SUMMARY**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
JALAN MAJAPAHIT NO. 54**

**2016**

**RINGKASAN EKSEKUTIF  
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN  
HIDUP DAERAH (IKPLHD)  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
TAHUN 2016**

**I. PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Sumberdaya alam dan lingkungan hidup merupakan sumberdaya yang sangat penting bagi kehidupan umat manusia dan makhluk hidup lainnya. Perubahan pada lingkungan akan terus berlangsung dan cenderung mengarah pada kemungkinan terjadinya kerusakan dan pencemaran. Perubahan yang terjadi secara alami merupakan reaksi dari lingkungan untuk tetap berada pada kesetimbangannya. Namun, perubahan dapat juga terjadi secara radikal seperti bencana alam dan merupakan fenomena yang sulit untuk dikendalikan serta umumnya berdampak besar dan penting terhadap kehidupan.

Untuk mengurangi dan mencegah dampak buruk aktivitas pembangunan terhadap lingkungan diperlukan konsep pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Konsep tersebut dapat terlaksana bila didukung oleh data dan informasi yang akurat dan valid mengenai kondisi dan potensi lingkungan tersedia secara berkesinambungan. Hal ini sejalan dengan Agenda 21 (Hasil konferensi PBB tentang lingkungan dan pembangunan di Rio de Janeiro tahun 1992) dan Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 62 yang keduanya menyebutkan tentang pentingnya pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai lingkungan hidup.

Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi sangat penting karena menyajikan perubahan penduduk dengan kualitas dan aktivitasnya, tekanan terhadap lingkungan, karena kegiatan ekonomi yang merupakan aktivitas

untuk memenuhi kebutuhan dana kesejahteraan penduduk di wilayah ini. Informasi ini pula akan memenuhi kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik sebagaimana ditetapkan dalam Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang “Keterbukaan Informasi Publik (KIP)”.

## **B. GAMBARAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

### **B.1. KONDISI GEOGRAFIS**

Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri atas 2 (dua) pulau besar yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dan ratusan pulau-pulau kecil. Luas wilayah NTB adalah 49.312,19 km<sup>2</sup> yang terdiri dari daratan 20.153,15 km<sup>2</sup> dan lautan 29.159,04 km<sup>2</sup>. Topografi wilayah NTB didominasi daerah perbukitan dan pegunungan dengan kemiringan antara 26 – 46%. Secara administratif Provinsi NTB terdiri atas 8 (delapan) Kabupaten dan 2 (dua) Kota dengan ibukota terletak di Kota Mataram. Dimana Kabupaten Sumbawa merupakan daerah terluas dengan luas daerah 6643.98 km<sup>2</sup> atau 32.97 %, sedangkan daerah terkecil yaitu Kota Mataram dengan luas daerah 61.3 km<sup>2</sup> atau 0.3 %.

### **B.2. TATA RUANG**

Perencanaan Tata Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat lebih menekankan pada pengembangan ruang berbasis sumberdaya lokal.

#### **1. Rencana Pengembangan Wilayah Prioritas.**

Terdiri dari wilayah bermasalah (rawan bencana dan hutan lindung), wilayah potensial (sepanjang jalur transportasi utama dan wilayah tujuan wisata), wilayah yang memiliki sumberdaya alam besar (emas di Sekotong, pasir besi di Selong, emas-tembaga-perak di Jereweh, pasir besi di Alas, pasir besi dan belerang di Dompu, emas-perak-pasir besi di Bima), dan kawasan di sekitar pelabuhan udara dan pelabuhan laut.

2. Rencana Pemantapan Kawasan Lindung.

Terdiri dari kawasan yang memberikan perlindungan terhadap wilayah dibawahnya (kawasan hutan lindung, resapan air, sempadan sungai dan sempadan pantai), kawasan sekitar waduk/danau, kawasan sekitar mata air, kawasan suaka alam (kawasan cagar alam, kawasan suaka margasatwa, hutan bakau dan kawasan suaka alam laut), dan kawasan rawan bencana.

3. Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya.

Terdiri dari kawasan hutan produksi (hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap), kawasan pertanian pangan (sawah, tegalan/kebun), kawasan perikanan (ikan laut, ikan darat, tambak), kawasan perkebunan, kawasan peternakan, dan kawasan pariwisata.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan dari penyusunan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 adalah:

1. Dapat digunakan sebagai dasar saat pengambilan keputusan untuk memperbaiki lingkungan di daerah tertentu.
2. Memberi gambaran secara nyata melalui data yang diambil dari lingkungan secara nyata guna meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan pengertian ke pada masyarakat tentang kondisi lingkungan.
3. Dapat digunakan untuk mengukur perkembangan dan kemajuan lingkungan di suatu daerah tertentu.

### **D. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup yang disajikan dalam Laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah ini meliputi; kualitas lingkungan hidup berdasarkan air, udara, laut, pesisir, lahan, pertambangan, kuantitas dan kualitas penduduk serta sosial ekonomi.

## II. ISU PRIORITAS LINGKUNGAN

Isu lingkungan hidup yang dikemukakan adalah isu strategis yang terkait dengan perkembangan wilayah dan dampaknya terhadap lingkungan daerah.

Kriteria yang dapat dijadikan isu prioritas :

1. kerusakan sumber daya alam; kerusakan keanekaragaman hayati;
2. pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan;
3. mendapat perhatian publik yang luas dan perlu ditangani segera (urgensi)

Dari kriteria-kriteria diatas dapat ditarik isu strategis adalah :

1. Tingginya cemaran E.Coli yang ada di Sungai dan Bendungan.

Berdasarkan hasil pengujian baku mutu air sungai yang dilakukan pada 9 (sembilan) lokasi sungai dan 4 (empat) lokasi bendungan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, diketahui bahwa konsentrasi E.coli pada masing-masing sungai dan bendungan masih sangat tinggi melebihi baku mutu yang dipersyaratkan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kualitas air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Tingginya jumlah penduduk yang belum memiliki Mandi Cuci Kakus (MCK) pribadi sebesar 26% dari jumlah KK yang ada di Nusa Tenggara Barat menyebabkan penduduk masih memanfaatkan aliran sungai untuk keperluan MCK. Selain itu, tingginya prosentase Rumah tangga miskin sebesar 47% dari total KK di NTB dan tingkat pendidikan masyarakat yang rendah sebesar 31% penduduk tidak sekolah yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas MCK sepanjang aliran sungai. Provinsi Nusa Tenggara Barat masih menduduki peringkat tingkat kemiskinan ke 28 dari 35 Provinsi se Indonesia dengan prosentase kemiskinan sebesar 16,02%. Tingginya cemaran E.coli menyebabkan terjangkitnya penyakit diare dan menjadi salah satu penyakit utama dari 10

(sepuluh) penyakit utama yang diderita penduduk di NTB. Pencemaran E.Coli pada aliran sungai tidak hanya berasal dari kotoran manusia, namun juga dari kotoran hewan dan sampah yang berada di sekitar aliran sungai.

2. Peningkatan alih fungsi lahan dan luasan lahan kritis

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai saat ini masih menggalakkan program pengembangan PIJAR (Sapi, Jagung dan Rumput Laut). Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat terutama Pemerintah Kabupaten Dompu sangat antusias dalam program penanaman jagung sebagai salah satu komoditas unggulan. Namun di sisi lain, sekitar 1.000 Ha hutan produksi yang ada di Kabupaten Dompu menjadi rusak karena pengalihan fungsi hutan menjadi lahan pertanian jagung yang ditanam oleh warga setempat. Kerusakan hutan terbesar terjadi di Kawasan Pacu dan Kesi Kabupaten Dompu.

Semakin menonjolnya tujuan jangka pendek yaitu memperbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi faktor penting penyebab terjadinya alih fungsi hutan menjadi lahan jagung. Program PIJAR telah memberikan kontribusi besar pada penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan daerah, swaembada pangan nasional dan penyerapan tenaga kerja.

Selain alih fungsi hutan menjadi kawasan pertanian, luasan lahan kritis yang ada di Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya bencana banjir terutama yang telah terjadi di Kabupaten Bima pada Bulan Desember 2016. Lahan kritis terluas berada di Kabupaten Bima yaitu seluas 161.120,5 Ha dari total luasan lahan kritis se Nusa Tenggara Barat sebesar 577.344,21 Ha.

3. Tambang Galian C dan PETI (Penambangan Emas Tanpa Izin)

Kegiatan penambangan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu penyumbang Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) harga konstan terbesar pertama sebesar 28,52%. Dari tahun ke tahun kegiatan penambangan galian C dan Penambangan Emas Tanpa Izin masih

marak terjadi, baik yang memiliki izin lingkungan maupun yang tidak memiliki izin lingkungan. Sampai dengan Tahun 2015, terdapat 250 IUP (izin Usaha Pertambangan) dengan berbagai jenis pertambangan diantaranya, logam, non logam, batuan dan pertambangan rakyat dengan total luasan 327.301, 36 Ha. Selain itu, sampai saat ini kegiatan penambangan emas tanpa izin masih marak terjadi di seluruh Kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dari data Dinas Eneregi dan Sumber Daya Mineral luasan PETI pada tahun 2012 sebesar 298 Ha.

### **III. ANALISIS PRESSURE, STATE DAN RESPONSE ISU LINGKUNGAN HIDUP DAERAH**

#### **3.1. TATAGUNA LAHAN**

Penggunaan lahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat secara umum dirinci menjadi laan sawah sebesar 12,89%, laan bukan pertanian sebesar 22,41%, dan lahan pertanian bukan sawah sebesar 64,69% dari total luas lahan sebesar 1.987.104 Ha. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir lahan sawah mengalami peningkatan sebesar 6,04%, lahan bukan sawah mengalami peningkatan sebesar 43,22% sedangkan lahan bukan pertanian mengalami penurunan sebesar 56,35%.

##### **3.1.1. Lahan kering**

Lahan kering adalah hamparan lahan yang tidak pernah digenangi air atau tergenang air pada sebagian waktu selama setahun. Lahan kering dapat digunakan untuk usaha pertanian dengan menggunakan air secara terbatas dan biasanya hanya mengharapkan dari curah hujan.

Diketahui sekitar 16% lahan di Provinsi NTB adalah lahan kering dengan luas lahan kering terbesar terdapat di Kabupaten Bima yaitu 89,911 Ha atau 23,48% dan terendah Kota Mataram sebesar 73 Ha atau 0,02%.

### **3.1.2. Lahan kritis**

Luas lahan kritis di Provinsi NTB mencapai 577.344,21 Ha atau sekitar 29% dari luas wilayahnya. Lahan kritis paling luas terdapat di Kabupaten Bima yaitu 161.120,5 Ha. Sedangkan paling rendah yaitu Kota Mataram yang tidak memiliki lahan kritis. Perbandingan luas lahan kritis dengan luas daerah per kabupaten tertinggi untuk wilayah didalam kawasan hutan tertinggi terdapat di Kabupaten Sumbawa Barat yaitu 57.33% sedangkan untuk wilayah diluar kawasan tertinggi terdapat di Kabupaten Lombok Tengah 53.25%.

Penanganan lahan kritis mutlak dilakukan karena berdampak sangat luas terhadap lingkungan dan kehidupan mahluk hidup. Lahan kritis dapat memicu kejadian bencana alam, kegagalan panen dan pada akhirnya meningkatkan kemiskinan penduduk.

### **3.1.3. Tutupan Lahan**

Tutupan lahan yang diindikasikan menyimpang terbesar untuk kawasan lindung terdapat di sawah yaitu penambahannya sebesar 12.978,33 Ha. Untuk Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya alam terbesar di pertanian lahan kering dengan penyimpangan sebesar 1.980,70 Ha. Sedangkan untuk kawasan hutan mangrove indikasi penyimpangan terbesar di Pertanian lahan kering sebesar 732,19 Ha.

Untuk kawasan budidaya penyimpangan terbesar terjadi di hutan produksi yang terdapat di pertanian lahan kering sebesar 12359,8 Ha. Untuk kawasan pertanian penyimpangan terbesar di daerah pemukiman sebesar 24,940.000 Ha. Kawasan perkebunan indikasi penyimpangan terdapat di kawasan permukiman sebesar 26.061,38 Ha. Untuk kawasan Pertambangan dan danau/waduk penyimpangan terbesar di permukiman yaitu sebesar 1.409,84 Ha dan 47 Ha.

Simpangan pola ruang peningkatan lahan terbesar terapat di daerah tutupan lahan pertanian dengan pola ruang kawasan perkebunan sebesar 26.061,38 Ha. Untuk daerah tutupan lahan pertanian lahan kering peningkatan



terbesar terdapat di kawasan hutan produksi dengan peningkatan sebesar 12.350,8 Ha. Sedangkan di pola ruang sawah peningkatan tertinggi terdapat di kawasan perkebunan yaitu sebesar 20.342,95 Ha.

### 3.2. Hutan

Provinsi NTB memiliki luas wilayah yaitu 2,015,315 Ha, dengan luas kawasan hutan 1.071,722,83 Ha atau 53 % dari luas wilayah NTB, persentase ini sudah melebihi persentase minimum kawasan hutan di suatu wilayah yaitu 30% dari total luas daratannya. Luas kawasan hutan terbesar terdapat di Kabupaten Sumbawa yaitu sebesar 389,675.35 Ha atau 58.65% dari luas wilayahnya sedangkan yang terendah yaitu Kota Mataram yang tidak memiliki kawasan hutan.

### 3.3. Laut dan Pesisir

Secara biofisik, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mempunyai potensi sumberdaya pesisir dan laut yang cukup luas. Luas wilayah pesisir dan laut Provinsi NTB hingga radius 12 mil laut adalah sekitar 49.312,19 km. Luas daratannya sebesar 20.153,15 km atau 40,87% dari luas wilayah NTB seluruhnya dan luas lautannya 29.159,04 Km atau 59,13% dari luas NTB seluruhnya. Panjang pantai di Provinsi NTB adalah 2.333 km dan periaran karang sekitar 3.601 km. Sementara itu panjang pantai Pulau Lombok 423 km, sedang Pulau Sumbawa 1.202 Km.

#### 3.3.1. Padang Lamun

Luas padang lamun di Provinsi NTB yaitu 9,379 Ha dimana padang lamun terluas terdapat di Kabupaten Sumbawa dengan luas 4,477 Ha sedangkan Kota Bima dan Kota Mataram tidak memiliki padang lamun. Jenis lamun yang terdapat di Provinsi NTB *Zostera sp*, *Cymodocea rotundata*, *Cymodocea serrulata*, *Halodule pinifolia*, *Halodule uninervis*, *Syringodium isoetifolium*, *Thalassodendron ciliatum*, *Enhalus acoroides*, dan *Thalassia hemprichii*.

Padang lamun di Kecamatan Alas merupakan yang paling luas yaitu 1.013,2 Ha (10,80%), diikuti Kecamatan Langgudu seluas 835,6 Ha (8,91%), Kecamatan Buer 690,0 Ha (7,36%), dan Kecamatan Lape 663,3 Ha (7,07%). Wilayah kecamatan di Pulau Lombok yang cukup luas hamparan padang lamunnya adalah Kecamatan Sekotong Tengah yaitu 625,4 Ha (6,67%) dan Kecamatan Jerowaru seluas 571,5 Ha (6,09%).

Nilai penutupan lamun di perairan WP3K pada seluruh kawasan pengembangan kelautan dan perikanan Provinsi NTB berkisar antara 10,00% hingga 77,15%. Status penutupan lamun paling besar terdapat di perairan Kawasan Teluk Sanggar dan sekitarnya yaitu 74,3% dengan status “Kaya/Sehat”. Sedangkan penutupan lamun yang berstatus “Miskin” yaitu di Kawasan Senggigi dan sekitarnya dengan tutupan mulai 18,70% sampai 28,80%.

Padang lamun di Provinsi NTB memiliki nilai penting bagi kepentingan ekologi yang bermuara pada ketahanan pangan dan kesehatan manusia, keanekaragaman biodiversitas perairan pesisir, dan keberadaan pulau-pulau kecil. NTB menginisiasi kawasan konservasi berdasarkan keberadaan ekosistem padang lamun.

### **3.3.2. Terumbu Karang**

Luas terumbu karang di Provinsi NTB yaitu 37,107 Ha, dimana Kabupaten Sumbawa memiliki terumbu karang terbesar dengan luas 10.856 Ha sedangkan Kota Mataram tidak memiliki ekosistem terumbu karang. Sebaran terumbu karang terluas berada di perairan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (WP3K) Kawasan Teluk Saleh yang mencapai 5.319,50 hektar atau sekitar 30,59% dari luas keseluruhan ekosistem terumbu karang di KPKP Provinsi NTB. Sedangkan yang paling sempit adalah sebaran ekosistem terumbu karang di “Kawasan Senggigi dan sekitarnya (159,40 Ha)” dan “Kawasan Gili Matra dan sekitarnya (236,25 Ha)”.

### **3.4. KUALITAS AIR**

#### **3.4.1. Kualitas Air Sungai**

Pemantauan kualitas air dilakukan di 8 sungai yaitu sungai Ancar, Dodokan, Babak, Brang Biji, Sori Padolo, Rabaluju, Meninting dan Moyo. Titik pengambilan sampel di bagian hulu, tengah dan hilir dari sungai tersebut.. Keseluruhan sungai yang di lakukan pemantauan tersebut termasuk dalam golongan air kelas II.

#### **3.4.2. Kualitas Air Bendungan**

Pemantauan kualitas air bendungan dilakukan di empat bendungan di wilayah NTB yaitu di Bendungan Batu Jai, Bendungan Pengga, Bendungan Pandanduri dan Bendungan Tibu Kuning. Titik pengambilan sampel di hulu, tengah dan hilir dari bendungan. Berdasarkan hasil klasifikasi maka ke empat bendungan tersebut termasuk dalam mutu air kelas IV.

Dari data kualitas air sungai dan bendungan dapat diketahui jika sumber pencemar utama yaitu bakteri e-coli yang disebabkan kebiasaan masyarakat masyarakat yang tinggal di bantaran sungai sering memanfaatkan sungai dalam kehidupan sehari-hari mereka, seperti mencuci dan mandi. Penduduk yang bermukim di sepanjang sungai juga biasanya memanfaatkan badan sungai sebagai lokasi buang air besar (BAB) dan tempat pembuangan limbah padat/sampah maupun limbah cair.

Fasilitas tempat buang air besar sangat dibutuhkan oleh setiap rumah tangga. Namun, kepadatan penduduk di suatu wilayah dapat menimbulkan permasalahan bagi penyediaan tempat buang air besar.

### **3.5. KUALITAS UDARA**

Pengujian kualitas udara dilakukan pada 3 titik pengambilan sampel yaitu di Jalan Langko, Jalan Selaparang dan Jalan Majapahit. Semua nilai konsentrasi SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, O<sub>3</sub>, TSP, Pb, yang terukur pada semua lokasi pemantauan masih berada dibawah Nilai ambang batas sedangkan nilai konsentrasi Hidrokarbon (HC) yang terukur di semua lokasi berada diatas Nilai ambang batas HC: 160 ug/m<sup>3</sup> (PP.41/1999). Hal ini kemungkinan disebabkan oleh adanya kompresi yang lemah, campuran udara-bensin yang kaya (kebanyakan bensin/kurang udara) dan pengapian busi yang tidak baik menyebabkan senyawa HC yang tinggi dalam gas buang sehingga mengakibatkan tenaga mesin lemah dan boros bensin.

Jumlah kendaraan bermotor tiap tahun terus meningkat sehingga menyebabkan tekanan terhadap lingkungan. Jumlah penduduk di Provinsi NTB yang semakin meningkat dari tahun ke tahun mengakibatkan bertambahnya jumlah kendaraan. Jumlah kendaraan bermotor di Provinsi NTB terus meningkat dari tahun ke tahun dimana rata-rata pertumbuhan kendaraan bermotor selama 4 tahun sebesar 7,7%.

Bertambahnya jumlah kendaraan bermotor menyebabkan meningkatnya konsumsi bahan bakar. Penggunaan bahan bakar di Provinsi NTB selama tahun 2016 untuk Premium sebesar 382.187 kilo liter, untuk solar sebesar 147.335 kilo liter, untuk minyak tanah sebesar 38.285 kilo liter dan untuk LPG sebesar 69.254.700 kilogram

### **3.6. BENCANA ALAM**

Pada tahun 2016 bencana alam berupa banjir merata diseluruh wilayah Provinsi NTB dan menimbulkan banyak kerugian. Dimana jumlah korban terdiri dari 21.810 kk terdampak, 98.463 jiwa mengungsi dan 9 jiwa meninggal dunia. Selain menimbulkan korban jiwa banjir juga merusak fasilitas-fasilitas

diantaranya puluhan sekolah rusak berat dan ringan, ratusan rumah rusak berat, sedang dan ringan, beberapa tempat ibadah rusak ringan dan 12 jembatan terputus. Perkiraan nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari bencana banjir sebesar Rp. 5.679.095.000,-

Dimana total kecamatan yang terkena bencana kekeringan yaitu 76 kecamatan, yang terdiri dari 379.586 kk dan 933.306 jiwa.

### **3.7. PERKOTAAN**

#### **3.7.1. Kependudukan**

Jumlah penduduk Provinsi NTB pada tahun 2016 yaitu sebesar 5.198.806 jiwa dengan rincian 2.602.015 jiwa (50,05%) diantaranya laki-laki dan 2.596.791 jiwa (49,95%) perempuan. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kabupaten Lombok Timur sebesar 1.286.048 jiwa sedangkan jumlah penduduk paling sedikit yaitu Kabupaten Sumbawa Barat sebesar 134.343 jiwa. Sebaran penduduk terbesar berdomisili di Kabupaten Lombok Timur yaitu sebesar 25% sedangkan sebaran penduduk terendah terdapat di Kabupaten Sumbawa Barat yaitu sebesar 2,5%.

#### **3.7.2. Timbulan Sampah**

Timbulan sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu per satuan waktu. Total timbulan sampah rumah tangga yang dihasilkan per hari dari penduduk di Provinsi NTB tahun 2016 adalah 1.579.303,67 kg/hari.. Jumlah timbulan sampah terbesar yaitu di Kabupaten Lombok Timur sebesar 381.902,58 kg/hari atau 24,18% sedangkan yang terkecil yaitu Kabupaten Sumbawa Barat yaitu sebesar 42.783,19 kg/hari atau 2,72%.

#### **IV. INOVASI DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, maka Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang terkait melakukan berbagai macam upaya guna merehabilitasi lingkungan, antara lain:

##### **4.1. Reboisasi**

Dalam kurun waktu 2011 – 2015 luas lahan yang ditanami seluas 15.173 Ha. Pada tahun 2014 luas wilayah yang direboisasi sebesar 1.151 Ha dengan jumlah pohon 376.400 batang dan pada tahun 2015 luas wilayah yang direboisasi sebesar 1.909,75 Ha dengan jumlah pohon 1.382.750 batang. Dari data tersebut diketahui persentase peningkatan luas lahan yang direboisasi sebesar 65,9% dan untuk jumlah pohon yang ditanami sebesar 267,4%.

Program reboisasi dilakukan oleh pemerintah bekerjasama dengan masyarakat. Pihak pemerintah menyalurkan bibit kepada masyarakat untuk ditanam. Bibit pohon yang disediakan pemerintah antara lain pohon mahoni, trengguli, jati, sengan, kenari, jambu mete, gaharu, keluwih, johar, dan kemiri. Sumber bibit berasal dari beberapa lokasi persemaian, yaitu di Sesaot (Lombok Barat), Mangkung (Lombok Tengah), Tibuborok (Lombok Timur), dan Gontar dan Batulanteh (Sumbawa), dan sebagainya.

##### **4.2. Penghijauan**

Luas lahan yang diluar kawasan hutan yang ditanami selama tahun 2011 – 2015 mencapai 27.052,314 Ha.

Pada tahun 2014 luas wilayah penghijauan sebesar 510 Ha dengan jumlah pohon 285.000 batang dan pada tahun 2015 luas wilayah yang direboisasi sebesar 425 Ha dengan jumlah pohon 200.000 batang. Dari data tersebut diketahui terjadi penurunan persentase luas lahan penghijauan sebesar -16,6% dan untuk jumlah pohon yang ditanami sebesar -29,8%.

### **4.3. Bangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA)**

Penerapan teknik konservasi tanah dan air berupa pembangunan dam pengendali, dam penahan, sumur resapan air, embung, parit buntu/rorak, pengendali jurang dengan tujuan untuk mempertahankan tanah dan air dari kehilangan dan kerusakannya melalui pengendalian erosi, sedimentasi dan banjir sehingga lahan dan air dapat dimanfaatkan secara optimal. Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA) selama tahun 2011-2015 sebanyak 139 unit.

### **4.4. PERAN SERTA MASYARAKAT**

Salah satu peran masyarakat yaitu melalui program Hutan kemasyarakatan (Hkm). Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara dengan sistem pengelolaan hutan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat tanpa mengganggu fungsi pokoknya. Hutan kemasyarakatan diselenggarakan dengan berazaskan pengelolaan hutan secara lestari. Luas PAK HKm yaitu 34.601,50 Ha, dengan total realisasi 11.544,40 Ha (46,9%) dan sisa real PAK HKm 13.057,10 Ha. Persentase realisasi terbesar yaitu di Kota Bima 100% dan yang terendah Kabupaten Lombok Timur sebesar 34%.

### **4.5. INOVASI GEMPITA KREATIF**

#### **(Gerakan Membangun Tata Kelola Hutan Secara Kolaboratif dan Inovatif)**

- TAPAK  
Tempat Pembuangan Akhir Sampah di kawasan hutan.
- LIMBOP (Limbah Hutan Optimal)  
Pemenuhan kebutuhan bahan baku unit mesin pelet, pengolah limbah hutan (semak belukar/ ranting), dan limbah kertas sebagai bahan campuran yang diperoleh dari berbagai instansi.

- Paper Less Manajemen  
Disposisi dan pemeriksaan surat melalui media elektronik untuk meminimalisir penggunaan kertas konsep, dan keterbatasan waktu/tempat karena keberadaan pejabat struktural sedang tugas luar
- Pengamanan rutin berlapis  
Upaya pengendalian perambahan/illegal logging, Patroli hutan oleh KPH secara rutin 7 hari kerja, Pos penjagaan berlapis di 11 KPH (24 jam) secara terpadu dengan TNI & POLRI.
- APL- Daerah  
Optimalisasi APL vegetasi hutan alam sekitar 11 KPH, yang belum ada peruntukan. Kawasan APL ini menjadi potensi illegal logging, yang perlu dilakukan pengamanan melalui penugasan Gubernur kepada Dinas LHK/KPH.
- TAKIMHUT  
Penataan pemukiman perambah hutan (uji coba 99 rumah), melalui sinergitas dengan program penataan rumah kumuh. Dinas Perumahan NTB.
- KPH Berkoalisi  
Mengembangkan kemitraan produktif dengan masyarakat pengelola hutan di 11 KPH.